



## LAPORAN PENELITIAN

### DAMPAK IMPLEMENTASI PP NO. 69/1992 DI KABUPATEN DATI II SEMARANG

Oleh :

Dra. Endang Hari Oemi K.,SU  
dkk.

UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

---

DIBLAYAI OLEH DIP BAGIAN PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN  
FASILITAS UNIVERSITAS DIPONEGORO NO. 202/XXIII/3/-/1996 TANGGAL  
30 MARET 1996 BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
TUGAS NO. 211A/PT09.OP/B/1996, TANGGAL 2 SEPTEMBER 1996

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Dampak Implementasi PP No. 69 tahun 992 di Kabupaten Dati II Semarang.

2. Personalia Penelitian

- a. Ketua : Dra. Endang Hari Oemi K., SU  
Jabatan/Gol./NIP : Lektor/III d/130702195  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
- b. Anggota : 1. Drs. Purwoko, MS : III/d/NIP. 131124441  
2. Dra. Fitriyah, MA : III/c/NIP. 131621640  
3. Drs. Teguh Yuwono : III/a/NIP. 132086672

3. Lokasi Penelitian : Kabupaten Dati II Semarang

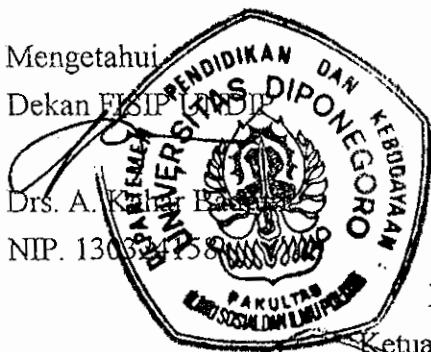
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

5. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 2.950.000,00 ( Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

6. Sumber Biaya : O&PF UNDIP tahun 1996/1997

Mengetahui  
Dekan FISIP

Drs. A. K. H. B. S. H.  
NIP. 130524758



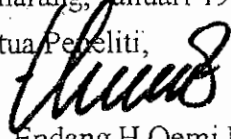
Mengetahui  
Ketua Lemlit UNDIP



Dr. Satoto  
NIP. 130368071

Semarang, Januari 1997

Ketua Peneliti,

  
Dra. Endang H Oemi K., SU  
NIP. 130702195

## KATA PENGANTAR

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1992, memberikan dampak terhadap (wilayah) Kabupaten Semarang : 13 Desa harus dilepas dan diserahkan kepada Kotamadya Salatiga. Pertanyaan yang muncul adalah : apakah implementasi PP No.69 tahun 1992 hanya terbatas atas pengurangan sebagian wilayah Kabupaten Semarang ? Sektor apa yang mengalami perubahan dengan diserah terimaknya ke 13 desa tersebut ?

Guna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan kajian terhadap dampak implementasi PP No. 69 tahun 1992. Perolehan data dan informasi sangat dibantu oleh Aparat Pemerintah khususnya Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Setwilda Kabupaten Dati II Semarang, Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Semarang beserta stafnya. Berkenaan dengan informasi tersebut Peneliti mengucapkan terima kasih semoga bantuannya bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan. Ucapan terima kasih yang sama diucapkan Peneliti kepada :

1. Dekan FISIP-UNDIP atas ijin untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporan.
2. Ketua Lembaga Penelitian UNDIP atas fasilitas pemberian dana penelitian
3. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi yang berminat pada kajian Pemerintahan dan Pembangunan. Peneliti menerima koreksi perbaikan apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembahasan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas semuanya itu peneliti sekali lagi mengucapkan terima kasih.

Semarang, Januari 1997

Tim Peneliti

## **ABSTRAKSI**

### **DAMPAK IMPLEMENTASI PP No. 69 TAHUN 1992 DI KABUPATEN DATI II SEMARANG**

Implementasi PP No. 69 Tahun 1992, memberikan konsekuensi perluasan wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan pengurangan luas wilayah atas Kabupaten Dati II Semarang. Proses ini langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pengembangan potensi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Yang pada akhirnya berpengaruh pada penerimaan/keuangan Daerah.

Studi terhadap Implementasi PP No. 69 Tahun 1992, merumuskan permasalahan: berapa Ha/Km luas wilayah Kabupaten Dati II Semarang berkurang ? berapa jumlah KK/jiwa penduduk berpindah ? berapa pula WP-PBB ikut berkurang ? Pertanyaan yang mendasar ialah : Apakah berkurangnya wilayah dan penduduk akan mempengaruhi jumlah penerimaan subsidi Daerah ? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian guna memperoleh data baik primer atau sekunder yang berkaitan dengan implementasi PP No. 69 Tahun 1992.

Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa implementasi PP No. 69 Tahun 1992 mempunyai dampak luas, tidak hanya pengurangan atas wilayah dan sejumlah penduduk di Kabupaten Dati II Semarang. Beberapa sumber penerimaan Daerah pun akan berkurang sejalan dengan proses penyerahan. Di dalam PP No. 69 Tahun 1992 disebutkan bahwa dengan penyerahan wilayah seluas 3.434,643 Ha dari Kabupaten Semarang ke Kotamadya Salatiga, ikut serta berpindahnya status kependudukan atas 41.756 jiwa. Kondisi tersebut mengalami perubahan sebagaimana pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 35 Tahun 1992 tanggal 7 Desember 1992. Yang merupakan tindak lanjut pelepasan bagian wilayah Kabupaten Semarang kepada Kodya Salatiga.

Pada Lampiran Berita Acara Serah Terima/ilusi materiil dan finansiil pelaksanaan PP No. 69 Tahun 1992 tercatat secara rinci bahwa luas wilayah Kabupaten Semarang yang diserahkan ke Kodya Salatiga adalah 4.108.140 Ha, yang mencakup empat wilayah Kecamatan dan 13 Desa. Adapun jumlah penduduk sebanyak 8.513 KK yang mencakup 44.664 jiwa. Bersamaan dengan itu, dialihtugaskan sebanyak 175 orang perangkat Desa dari pemerintahan Kabupaten Semarang ke pemerintahan Kotamadya Salatiga. Hibah atas 13 Desa ini merubah pula status dari Desa menjadi kelurahan sebagaimana ketentuan pada UU No. 5 tahun 1979.

Di bidang keuangan, terinformasikan beberapa (+ 8) jenis pendapatan di wilayah Kabupaten Semarang diserahkan kepada Dati II Salatiga yakni: Pajak Pembangunan I atas 5 buah Rumah Makan, Retribusi Parkir di tiga lokasi: Blotongan Rumah Makan Elang Sari, Pertigaan Tingkir, Potensi Kartu Ternak sebanyak 1010 kartu, Potensi Pemerasan susu perah, Pajak Reklame dan WP-PBB yang cukup besar jumlahnya. Di dalam Berita Acara Serah Terima, disebutkan ada 2(dua) tahun masa transisi. Sehingga penyerahan 100% atas sumber-sumber pendapatan Daerah baru berlaku pada tahun 1995/1996.

Telaah terhadap temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PP no. 69/1992 tidak langsung mempengaruhi pendapatan Daerah, khususnya penerimaan subsidi Daerah Kabupaten Dati II Semarang. Dampak tersebut akan terasa justru pada tahun anggaran 1996/1997. Namun perkembangan dan perubahan terutama yang berkaitan dengan keberhasilan pembangunan akan memperlemah atau mengurangi "hilangnya" sejumlah pendapatan Daerah. Hal ini didukung adanya pendapatan WP-PBB perkotaan dengan mulainya di buka hunian pemukiman di wilayah Kabupaten Dati II Semarang.

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION IMPACT OF PP No. 69/1992 IN THE SEMARANG REGENCY

The implementation of the Governmental Regulation No.69/1992 (PP No.69/1992), contains the consequence of an area expansion of Salatiga Municipality and decrease of the largeness of Semarang Regency. This process will directly or indirectly impacts on the potential development of Semarang Regency, which is finally impacts on the financial revenues of the local government.

A study on the implementation of PP No..69/1992 focused on : How many kilometres of the largeness of the Semarang Regency is going to be decreased ?; How many Semarang people are migrating with it; and how many landbuilding taxpayers are also reduced ? The main questions of this research are will PP No.69/1992 influences the largeness of Semarang Regency areas and its sum of people ? In order to find an answer to those questions, this research is carried out to obtain primary as well as secondary data cocerning with the policy implementation of PP No.69/1992.

The result of the study shows that the implementation of PP No.69/1992 has a vast impact, not only limited on the decrease of the largeness of the region and its people but also other social and economical impacts. Consequently, several sources of revenue will also decrease in line with the process of capitulation.

On government policy proposal as well as PP No.69/1992 stated that the capitulations of the region was 3,434.643 Ha from the Semarang Regency, which is also included the change of its 41,756.00 people status. Accordingly, it is really effect of policy implementation of Home Minister No. 35, 7 Desember 1992 which is confirmatted as a follow up of the release of a part of the region from the Semarang Regency to be alocated to the Salatiga Municipality.

Futhermore, on the supplement of the the Official Report on the capitulization/illusion on material and financial implementation of PP No.69/1992 is specifically stated that the region handed over the Municipality of Salatiga consists of 4,108,140.00 Ha, including four regencies areas and thirteen villages.

Concerning with people, there are 8.513 Family Heads involved amounting to 44.664 persons. In line with that 175 Village Administrators from the Semarang Regency, will be promoted administrators of Salatiga Municipality. The transfer of the thirteen villages also bring several administrative consequents like village status and administrative officer.

In the financial aspect, nowadays there are eight local income resources of Semarang Regency are handed Salatiga Municipality such as: Development Tax I on five restourants, Parking retributions at three locations: Blotongan, Elang Sari Restaurant and the Tingkir intersection, the potentials of 1,010.00 cattle cards, the potenciales of Milk Inspection cards, Advertisement Tax and PBB (Land and Building Tax) which cover a considerable amount. A two years transition period in the stated as at the Official Report means that 100% transfers of the local government income sources will occur effectively in the 1995/1996 period.

In conclusion, the impact of PP No. 69/1992 implementation indirectly influences the local government revenue , especially the regional subsidy of Semarang Regency.

In one hand, the research result also predicts that the impact of its conditions will be seriously felt in the 1996/1997 budget year. In other hand, when the development implementation and changes taking are place, which relevant to the success in construction will somewhat weaken or lesser the "loss" of some local government income can be solved. This fact is supported by the increase of PBB (Land and Building Tax) taxpayers with coresponde to the beginning of housing complex development in Semarang Regency.

## DAFTAR ISI

Hal Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Abstraksi .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Permasalahan .....	2
C. Tujuan dan Pemanfaatan Penelitian .....	4
D. Kerangka Pemikiran .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	10
<b>Bab II. Diskripsi Kabupaten Dati II Semarang</b> .....	11
A. Kondisi Statis .....	13
B. Kondisi Dinamis .....	16
<b>Bab III. Peraturan Pemerintahan No.69 tahun 1992 tentang :</b>	
<b>Perubahan Batas Baru Wilayah Kotamadya Dati II</b>	
Salatiga .....	26
A. Dasar Pertimbangan .....	26
B. Perubahan Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga .....	29
<b>Bab IV. Dampak Implementasi PP No.69 tahun 1992 di</b>	
Kabupaten Dati II Semarang .....	34
A. Perubahan Wilayah .....	34
B. Perubahan kependudukan .....	37
C. Perubahan Sumber Pendapatan Daerah .....	42
D. Penerimaan Daerah : Sumbangan dan Bantuan .....	52
<b>Bab V. Penutup</b> .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	63
Daftar Pustaka .....	65
Lampiran-Lampiran	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berupaya untuk mencukupi kebutuhan penduduknya di bidang perumahan khususnya dan sarana dan prasarana hidup lainnya. Penyusunan Rencana Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga terbentur pada luas wilayah yang tidak memenuhi syarat bagi penataan dan pengembangan kota modern.

Atas dasar itu, dibuat rencana usulan perluasan wilayah yang tertuang dalam surat Walikotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No.135/D1773, tanggal 28 Oktober 1983 dan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 170/27/1983, tanggal 8 Desember 1983. Berdasar usulan dari Pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga itu, maka Gubernur KDH Tingkat. I Jawa Tengah menurunkan Tim Peneliti ke Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Hasilnya adalah persetujuan rencana perluasan. Ini kemudian tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.69/1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang.

Berdasarkan peraturan tersebut, Kabupaten Dati II Semarang mengalami pengurangan luas wilayah. Ada sejumlah 13 desa dalam 4 kecamatan beralih ke wilayah Kotamadya Dati II Salatiga. Pemandahan wilayah berikut penduduknya memberi konsekuensi pada Kabupaten Dati II Semarang. Dengan berkurangnya luas wilayah administratif, antara lain berkurang pula sumber penerimaan daerah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keuangan daerah. Pada perkembangan selanjutnya perubahan batas wilayah memberikan dampak pada pelaksanaan otonomi di Kabupaten Dati II Semarang.

Mengingat perubahan wilayah administratif Kotamadya Dati II Salatiga mengambil wilayah Kabupaten Dati II Semarang, maka berdasarkan hal ini dilakukan studi terhadap dampak implementasi PP No. 69 tahun 1992 di Kabupaten Dati II Semarang.

## **B. RUANG LINGKUP DAN PERUMUSAN MASALAH**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah dampak implementasi PP No. 69 Tahun 1992 di Kabupaten Dati II Semarang. Dampak dari implementasi Peraturan Peraturann Pemerintah tersebut meliputi beberapa aspek, antara lain fisik kewilayahan, kependudukan dan sedikit banyak berpengaruh pula pada penerimaan daerah. Sehubungan dengan itu maka fokus penelitian diarahkan pada tiga hal tersebut.

Studi terhadap penerimaan daerah dibatasi pada penerimaan yang diperoleh dari PBB berdasarkan jumlah wajib pajak serta penerimaan subsidi dan bantuan pemerintah pusat yang dasar perhitungannya adalah jumlah penduduk.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka dirumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut :

1. Berapa luas wilayah kabupaten Dati II Semarang yang berkurang setelah implementasi PP No. 69 tahun 1992;
2. Berapa besar jumlah kepala keluarga dan jiwa dari penduduk Kabupaten Dati II Semarang yang berkurang setelah implementasi PP No. 69 tahun 1992;
3. Berapa besar jumlah wajib pajak PBB yang berkurang setelah implementasi PP No. 69 tahun 1992;
4. Apakah berkurangnya jumlah penduduk Kabupaten Dati II Semarang mempengaruhi jumlah penerimaan subsidi dari Pemerintah Pusat yang berupa subsidi daerah otonom dan Inpres Dati II ?;
5. Dampak lain apa kiranya yang muncul dari implementasi PP No. 69 tahun 1992.

Data penelitian ini meliputi data mengenai jumlah desa / kelurahan, jumlah penduduk dan besarnya penerimaan dari PBB dan subsidi maupun bantuan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Dati II Semarang baik sebelum maupun sesudah implementasi PP No. 69 tahun 1992.

Khusus untuk data mengenai besarnya penerimaan dari subsidi maupun bantuan Pemerintah Pusat akan diambil data tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah implementasi PP tersebut, yaitu tahun anggaran 1989/1990, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 dan 1994/1995.

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mencari informasi berapa luas wilayah Kabupaten Dati II Semarang yang berkurang setelah implementasi PP No. 69 tahun 1992;
2. Mencari informasi berapa jumlah kepala keluarga dan jiwa dari penduduk Kabupaten Dati II Semarang yang berkurang setelah implementasi PP No. 69 tahun 1992;
3. Mencari informasi berapa besar wajib pajak PBB yang berkurang setelah implementasi PP No. 69 tahun 1992;
4. Untuk mengetahui apakah berkurangnya jumlah penduduk Kabupaten Dati II Semarang akan mempengaruhi jumlah penerimaan subsidi dari Pemerintah Pusat yang berupa subsidi daerah otonom dan Inpres Dati II ?;
5. Untuk mengetahui dampak lain apa kiranya yang muncul dari implementasi PP No. 69 tahun 1992.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan mengenai dampak implementasi PP No. 69 tahun 1992, yang berkaitan erat dengan studi tentang otonomi daerah.
2. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan memberi masukan dalam mengambil kebijakan berikutnya yang berkaitan dengan implementasi PP No. 69 tahun 1992 tersebut.

#### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam menyusun strategi pembangunan ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dan dijadikan bahan perumusan strategi yaitu :

1. Masalah yang dihadapi;
2. Jumlah dan kualitas sumber daya yang tersedia;
3. Tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Dalam rangka pembangunan daerah ketiganya sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya daerah itu membuktikan kemampuannya. Akan halnya Kotamadya Dati II Salatiga, masalah yang dihadapi antara lain ruang/wilayah yang sempit dibandingkan jumlah penduduk yang ada (penduduk Kotamadya Dati II Salatiga) dimana ada yang

penduduk tetap, banyak pula yang penduduk sementara karena sekolah.

Adapun jumlah dan kualitas sumber daya yang tersedia, sekalipun Kotamadya Dati II Salatiga sudah bersifat kota, tetapi penduduknya masih banyak yang bergerak di sektor pertanian. Di samping itu alternatif mata pencaharian penduduk belum sepenuhnya mengarah pada sektor industri.

Tujuan pembangunan yang antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Daerah pertama kali ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan primer, antarlain kebutuhan papan. Diharapkan dengan penyediaan kebutuhan papan akan mengakait juga pemenuhan kebutuhan lain bersamaan dengan proses pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan.

Guna alasan penyediaan papan dan fasilitas lainnya maka Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Salatiga mengajukan rencana perluasan wilayah yang akhirnya disetujui oleh pihak yang berkompeten, yaitu Kabupaten Dati II Semarang sebagai pihak yang terkena perluasan dan Pemerintah atasan yang mengesahkan.

Akibat perluasan wilayah di Kotamadya Dati II Salatiga adalah berkurangnya luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan serta jumlah penduduk di Kabupaten Dati II Semarang. Berkurangnya tiga hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi (langsung maupun tak langsung) penerimaan yang akan diperoleh Kabupaten Dati II Semarang yang misalnya melalui penerimaan PBB dan sumbangan ataupun bantuan dari Pemerintah Pusat.

Subsidi/bantuan Inpres Dati II, misalnya, yang bersifat *block grant* merupakan bantuan perkapita. Dengan berkurangnya jumlah penduduk maka kemungkinan yang terjadi adalah pengurangan besarnya dana bantuan yang diterima Kabupaten Dati II Semarang. Luas wilayah merupakan pula faktor penentu besarnya jumlah bantuan. Bahkan bagi Dati II yang mempunyai wilayah atas pulau-pulau akan menerima tambahan bantuan yang diperhitungkan dengan jumlah pulau yang ada. Berkurangnya jumlah Desa atau Kelurahan akan berpengaruh pada penerimaan daerah sekalipun bantuan tersebut langsung diterima oleh Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Bagi Dati II akan mendapat bagian dari bantuan yang bersangkutan guna membiayai kegiatan monitoring/pengawasan terhadap penggunaan bantuan tersebut.

Disamping bantuan tersebut, Dati II menerima pula bantuan yang bersifat khusus macam dan arahnya ada tujuh. Beberapa diantaranya : bantuan sarana pendidikan SD baik swasta

maupun Negeri, bantuan sarana kesehatan, bantuan penghijauan, bantuan peningkatan jalan kabupaten/kotamadya dan lain bantuan.

Pemberian bantuan Pusat kepada Daerah Tingkat II itu merupakan campur tangan yang tidak dapat dihindari. Terutama di negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Selanjutnya disadari bahwa campur tangan tersebut akan mencapai hasil yang maksimum apabila terdapat koordinasi yang efektif dari berbagai usaha, dan untuk itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara global/nasional, regional maupun lokal.

Tingkat pembangunan diberbagai daerah sangat berbeda. Sebagai akibat dari keadaan ini dapat timbul jurang kesejahteraan masyarakat diberbagai daerah. Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat kota berbeda dengan ukuran kesejahteraan masyarakat pedesaan. Fasilitas hidup seperti air, makan, papan dan sandang merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, baik yang tinggal di Desa maupun yang di Desa.

Dalam hal kualitas dan kuantitas yang akan berbeda. Usaha Pemerintah untuk membantu dan meningkatkan pembangunan daerah bersumber pada keyakinan bahwa tujuan pembangunan bukan saja untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat ekonomi tetapi juga tujuan yang bersifat sosial dan politik (*Sadono Sukirno;1985;hal.25*).



Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan daerah itulah maka Pemerintah Daerah Kotamadya Salatiga mengharapkan campur tangan Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan, penyediaan ruang atau penambahan kewilayahan dan lainnya. Harapan tersebut terkabul dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah no.69 tahun 1992. Implementasi dari Peraturan Pemerintah tersebut akan memberikan satu keuntungan kepada Kotamadya Salatiga, tetapi juga memberikan pengurangan sebagian wilayah kewenangan Kabupaten Dati II Semarang.

Kenyataan ini memberi kesimpulan bahwa dalam jangka pendek maupun panjang pelaksanaan PP No. 69 tahun 1992 lebih menguntungkan bagi pihak Kotamadya Dati II Salatiga . Untuk sementara mungkin akan terasa sebagai hal yang merugikan bagi Kabupaten Dati II Semarang. Namun dalam pertumbuhan dan perkembangan daerah Kotamadya Dati II Salatiga yang akan datang pihak Kabupaten Dati II Semarang akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Beban pada pihak Kabupaten Dati II Semarang untuk mencari alternatif pengganti penerimaan yang telah lepas tidak akan sia-sia.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yakni hanya bermaksud untuk menggambarkan dampak dari implementasi PP No. 69 tahun 1992 dilihat dari fisik kewilayahan, penduduk dan penerimaan daerah.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Semarang. Sebagaimana telah disebutkan di atas data penelitian ini meliputi data mengenai jumlah desa/ kelurahan, jumlah penduduk dan besarnya penerimaan dari PBB dan subsidi maupun bantuan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Dati II Semarang baik sebelum maupun sesudah implementasi PP No. 69 tahun 1992. Khusus untuk data mengenai besarnya penerimaan dari subsidi maupun bantuan Pemerintah Pusat akan diambil data tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah implementasi PP tersebut, yaitu tahun anggaran 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 dan 1994/1995.

### 3. Teknik Analisis Data

Terhadap data sekunder tersebut akan dianalisis dengan menggunakan tabulasi dan statistik deskriptif. Analisis ini penting untuk mengetahui gambaran realitas di lapangan serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Dengan kata policy analyses merupakan titik sentral pendekatan dalam analisis ini.

Pada aspek lain akan juga dilakukan analisis kebijakan yang mencakup beberapa impact baik itu bersifat politik, ekonomi, sosial maupun lainnya. Oleh karena impact positif, negatif akan dijadikan sebagai salah satu kerangka acuan dalam penarikan kesimpulan dan rekomendasi.